

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Informasi merupakan salah satu jenis sumber daya yang paling utama yang dimiliki organisasi apapun bentuk organisasi tersebut. Bagi pihak-pihak di luar manajemen suatu perusahaan seperti investor dan manajer investasi, laporan tahunan merupakan informasi yang diharapkan mampu memberikan bantuan untuk membuat keputusan membeli, menahan atau menjual investasi serta menilai kemampuan manajemen perusahaan (emiten) untuk membayar dividen.

Keputusan investor untuk menanamkan investasinya terutama didasarkan pada informasi keuangan yang bisa didapatkannya dari laporan keuangan perusahaan. Laporan tahunan pada dasarnya merupakan sumber informasi bagi investor sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal dan juga sebagai sarana pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Binsar H Simanjuntak & Lusi Widiastuti : 2004). Oleh karena itu pengungkapan informasi laporan keuangan seharusnya memberikan informasi yang cukup dan memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Krisis keuangan yang menimpa Asia di tahun 1997 juga menimbulkan efek negatif pada perekonomian Indonesia. Banyak harga saham di negara-negara Asia jatuh. Banyak pihak percaya bahwa krisis ini muncul karena mayoritas bank dan perusahaan besar tidak mengungkapkan kredit serta hutang bermasalah

kepada pihak yang terkait. Sebagai akibatnya, banyak investor yang membeli saham perusahaan mengalami kerugian yang signifikan.

Banyak peneliti mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang memperburuk kondisi Indonesia saat itu adalah lemahnya *Corporate Governance*. Lemahnya *Corporate Governance* ini ditandai dengan kurang transparannya pengelolaan perusahaan. Dengan kurang transparannya pengelolaan perusahaan, kontrol publik terhadap perusahaan menjadi sangat lemah.

*Good Corporate Governance* dibangun atas dasar prinsip-prinsip sebagai berikut:

Keadilan (*fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), dan tanggung jawab (*responsibility*). Prinsip-prinsip GCG tersebut memberikan penekanan terhadap kepentingan pemegang saham perusahaan (*shareholders*) sehingga dapat lebih mencerminkan *shareholder's drive concept*. Misalnya saja perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas (*fairness*), penyajian laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu (*transparency*), fungsi dan wewenang RUPS, komisaris, dan direksi (*accountability*). Prinsip yang terakhir, yakni tanggung jawab (*responsibility*), memberikan penekanan yang signifikan terhadap kepentingan *stakeholders* perusahaan.

Pengungkapan sangat erat kaitannya dengan praktik *Corporate Governance*. Dengan mengaplikasikan transparansi, asimetri informasi dapat diminimalkan, konsekuensi negatif dari pilihan yang buruk dapat dikurangi, serta masalah *moral hazard* dapat terselesaikan (Sidharta Utama : 2003).

Pengungkapan (*disclosure*) informasi keuangan dan non keuangan dalam dunia pasar modal sangat esensial sifatnya. Pengungkapan (*disclosure*) sangat dibutuhkan dalam pasar modal sebagai upaya untuk memelihara, mempertinggi

kredibilitas pasar modal serta sarana proteksi terhadap investor. Kondisi pasar modal di tahun 2006 cukup membesarkan hati. Hal ini ditunjukkan oleh trend pertumbuhan dan beberapa indikator pasar modal. IHSG Bursa Efek Jakarta selama tahun 2006 mengalami pertumbuhan sebesar 55,3%, mencapai level 1805,52 pada sesi terakhir perdagangan tanggal 28 Desember 2006. Nilai kapitalisasi pasar di BEJ meningkat 55,88% dari Rp801,3 triliun di tahun 2005 menjadi Rp1.249,1 triliun di tahun 2006. Sayangnya peningkatan di pasar modal tersebut tidak diikuti dengan kepatuhan emiten. Di tahun 2006, aktivitas pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan Bapepam-LK bermuara pada pengenaan sanksi administratif berupa denda kepada 304 pihak dengan total nilai denda sebesar Rp8,2 milyar.

Ketua Bapepam, Herwidayatmo mengatakan bahwa :

Prinsip pasar modal adalah keterbukaan pengungkapan informasi bagi semua pelaku pasar modal. Oleh karena itu diharapkan kesadaran emiten selaku perusahaan yang mempunyai tanggung jawab publik yang besar untuk selalu mengedepankan kerangka dasar dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu dapat dipahami (*understandable*), relevan (*relevant*), dapat diandalkan (*reliable*), serta dapat diperbandingkan (*comparable*). Hal ini sesuai dengan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan 2009, paragraf 24.

Dasar perlunya praktek pengungkapan laporan keuangan oleh manajemen kepada pemegang saham dijelaskan dalam *agency theory*. Menurut Jensen dan Meckling (1976), *agency relationship* (hubungan keagenan) ada bilamana satu atau lebih individu yang disebut dengan *principal* bekerja dengan individu atau organisasi lain yang disebut *agent*, *principal* akan menyediakan fasilitas dan mendelegasikan kebijakan pembuatan keputusan kepada agen. Agen diwajibkan

memberikan laporan periodik pada principal tentang usaha yang dijelankannya. Oleh karena itulah, laporan keuangan merupakan sarana akuntabilitas manajemen kepada pemiliknya.

Laporan keuangan mencerminkan kondisi emiten yang sebenarnya bila penyusunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini ketentuan yang berlaku di Indonesia, yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang di dalamnya memuat peraturan tentang Laporan Keuangan, Catatan Atas Laporan Keuangan, dan informasi tambahan lainnya, sedangkan informasi lain yang tersedia di Laporan Tahunan, seperti hasil analisis dan diskusi manajemen tidak diatur secara langsung oleh PSAK tetapi oleh regulator bursa, dalam hal ini adalah Bapepam.

Peraturan tentang standar pengungkapan informasi dalam laporan tahunan bagi perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum dan Perusahaan Publik, terakhir dikeluarkan Bapepam tanggal 7 Desember 2006, yaitu peraturan Nomor : Kep-134/BL/2006. Berbagai upaya untuk mendorong keterbukaan telah banyak dilakukan. Akan tetapi dalam prakteknya banyak perusahaan yang belum memenuhi ketentuan penyajian khususnya mengenai pengungkapan dalam laporan tahunan. Berikut data berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengungkapan pada perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta masih relatif rendah dengan total persentase pengungkapan sebesar 41,9%.

**Tabel 1.1 Tingkat Pengungkapan Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia Tahun 2003**

<i>Description</i>	<i>Actual Score/Maximum Score</i>
<i>1. Background Information</i>	44,25%
<i>2. Summary of Financial Performance</i>	84,9%
<i>3. Non-Financial Information</i>	17,7%
<i>4. Projected Information</i>	4,4%
<i>5. Management Discussion and Analysis</i>	55,7%
<b><i>Overall Score</i></b>	<b>41,9%</b>

**Sumber : Siddharta Utama (Usahawan No.05/TH.XXXII Mei 2003)**

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan kelengkapan laporan tahunan merupakan hal yang penting dilakukan. Hal ini akan memberikan gambaran tentang sifat perbedaan kelengkapan pengungkapan antar perusahaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta dapat memberikan petunjuk tentang kondisi perusahaan pada suatu masa pelaporan.

Menurut Na'im dan Rakhman (2000:70) pengungkapan laporan keuangan (*disclosure of financial statement*) merupakan isu yang paling menarik dalam dunia pasar modal. Isu pengungkapan laporan keuangan menjadi menarik karena pengungkapan laporan keuangan merupakan faktor signifikan dalam pencapaian efisiensi pasar modal dan merupakan sarana akuntabilitas publik.

Laporan tahunan perusahaan atau *annual report* merupakan salah satu bentuk pelaporan keuangan yang disusun oleh emiten setiap tahun sekali dan bersifat wajib. Informasi yang tersedia dalam laporan keuangan adalah informasi data keuangan dan informasi non-keuangan. Selain itu, laporan tahunan merupakan media bagi manajemen perusahaan untuk memberikan informasi kepada pihak luar. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan tahunan

perusahaan adalah investor dan calon investor, kreditor dan calon kreditor, analisis sekuritas, pemerintah, serikat kerja, pemasok, pelanggan dan masyarakat.

Penelitian sebelumnya tentang pengungkapan laporan keuangan memberikan hasil yang beragam, contohnya, dalam penelitian ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi laporan tahunan, namun dalam penelitian lain, hal tersebut tidak berpengaruh. Beberapa hal yang membuat hasil penelitian-penelitian tersebut berbeda diantaranya adalah karena adanya perbedaan pemilihan sampel dan tahun yang digunakan, penggunaan item yang berbeda dalam indeks pengungkapan serta perbedaan uji statistik yang digunakan.

Fitriani (2001) melakukan penelitian tentang signifikansi perbedaan tingkat kelengkapan pengungkapan wajib dan sukarela pada laporan keuangan. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 102 perusahaan dengan periode penelitian pada laporan keuangan tahun 1999. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi kelengkapan pengungkapan wajib yaitu ukuran perusahaan, status perusahaan, dan jenis perusahaan, *net profit margin* dan Kantor Akuntan Publik. Faktor yang mempengaruhi indeks pengungkapan sukarela yaitu variabel seperti pengungkapan wajib, kecuali jenis perusahaan, sedangkan tingkat *leverage* dan likuiditas tidak mempengaruhi indeks kelengkapan pengungkapan wajib dan sukarela.

Peneliti berikutnya adalah Binsar H. Simanjuntak dan Lusy Widiastuti, dalam makalahnya yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur

yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 2002”, dan dimuat oleh Jurnal Riset Akuntansi Indonesia Vol. 7, No.3, September 2004. Penelitian ini menganalisis pengaruh tingkat *leverage*, likuiditas, profitabilitas, porsi kepemilikan saham oleh investor publik, dan umur perusahaan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Hasilnya, semua variabel tersebut secara bersama-sama mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Secara parsial, tingkat *leverage* yang diproyeksikan dengan *debt to equity ratio*, tingkat profitabilitas yang diproyeksikan dengan *return on assets*, dan porsi kepemilikan saham oleh investor publik secara signifikan mempengaruhi kelengkapan pengungkapan laporan keuangan pada industri manufaktur.

Hal ini berbeda dengan yang penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni, dkk (2002) yang menganalisis faktor-faktor fundamental perusahaan terhadap kelengkapan laporan keuangan. Dengan sampel sebanyak 76 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ. Dengan menggunakan variabel independen seperti tingkat likuiditas, tingkat *leverage*, tingkat profitabilitas dan *common stock ratio*. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bukti empiris bahwa secara parsial dan secara bersama-sama tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor-faktor fundamental perusahaan terhadap tingkat pengungkapan perusahaan.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengungkapan ini adalah karena selama ini keterbukaan emiten terhadap pengungkapan informasi sampai saat ini belum benar-benar dijalankan. Sudah beberapa kali otoritas bursa berteriak agar para perusahaan terbuka (emiten) lebih transparan menyampaikan informasi seputar perusahaan. Apalagi kewajiban bagi perusahaan terbuka untuk

menyampaikan keterbukaan informasi penting sudah diamanatkan dalam aturan resmi. Pentingnya informasi tersebut dilaporkan oleh perusahaan terbuka pada Bapepam dan masyarakat adalah sebagai wujud pertanggungjawaban emiten yang telah meraup dana dari masyarakat.

Pada penelitian ini penulis tertarik untuk menggunakan sampel laporan tahunan emiten yang termasuk dalam 45 *Biggest Market Capitalization* di Bursa Efek Indonesia. Emiten-emiten yang termasuk dalam 45 *Biggest Market Capitalization* adalah emiten-emiten yang memiliki nilai kapitalisasi pasar saham terbesar di Bursa Efek Indonesia. Nilai kapitalisasi pasar saham menunjukkan nilai sebuah perusahaan berdasarkan perhitungan harga pasar saham dikalikan dengan jumlah sahamnya yang beredar. Hal ini berarti emiten-emiten yang masuk dalam 45 *Biggest Market Capitalization* ini memiliki jumlah saham beredar yang besar dengan harga pasar saham yang tinggi sehingga *stakeholder* dan *stockholder* perusahaan tersebut memiliki kebutuhan akan pengungkapan informasi yang lebih detail. Karena itulah tingkat pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan tersebut terhadap *stakeholder* dan *stockholders*-nya sangat tinggi.

Laporan tahunan 2008 diambil dengan pertimbangan bahwa di tahun 2008 perekonomian Indonesia sedang mengalami guncangan yaitu berupa krisis keuangan dan ekonomi global yang dipacu oleh krisis *subprime mortgage* di Amerika Serikat. Kasus *subprime mortgage* ini merupakan kasus yang menjadikan pengungkapan informasi entitas sangat penting dilakukan. Kasus ini terjadi pada Lehman Brothers Holdings Inc.



Menurut laporan Auditor Ernst Young, tersirat bahwa Lehman menggunakan rekayasa akuntansi untuk menutupi utang sebesar 50 miliar dolar AS di pembukuannya. Semua itu dilakukan untuk menyembunyikan ketergantungan dari utangnya. Dari bukti-bukti yang terkuak menunjukkan bahwa Lehman Brothers telah mengabaikan prinsip-prinsip GCG yang menjunjung transparansi, akuntabilitas, responsibilitas (pertanggungjawaban), independensi, dan *fairness* (keadilan atau kesetaraan). Dalam kasus ini, tampak sekali adanya ketidakterbukaan informasi.

Selain itu diambilnya tahun 2008 sebagai tahun penelitian adalah dikarenakan tahun 2008 merupakan tahun yang paling akhir emiten telah secara lengkap mengeluarkan laporan tahunan kepada publik serta dikarenakan belum banyak emiten mengeluarkan laporan tahunan 2009. Penelitian ini dibatasi hanya pada satu tahun saja. Hal ini dikarenakan adanya kecenderungan perusahaan tidak mengubah kebijakan pengungkapan (*disclosure*) dalam waktu dekat dan cenderung konstan dari tahun ke tahun seperti halnya penelitian Healy (1995). Pada penelitian ini indeks pengungkapan yang digunakan adalah berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Botosan (1997) yang merupakan alat penelitian yang cukup representatif, mudah diadaptasikan untuk digunakan pada pasar modal di Indonesia dan sudah diakui secara internasional.

Penulis memfokuskan penelitian hanya pada faktor ukuran perusahaan dan porsi kepemilikan saham dikarenakan dari berbagai penelitian dua faktor inilah yang masih menimbulkan perbedaan pendapat tentang berpengaruh atau tidaknya terhadap pengungkapan. Berikut adalah data tentang ukuran perusahaan

untuk emiten yang tergabung dalam 45 *Biggest Market Capitalization* tahun 2008 di Bursa Efek Indonesia.

**Tabel 1.2 Ukuran Perusahaan 45 Biggest Market Capitalization 2008 di Bursa Efek Indonesia**

No.	Jenis Industri	Jumlah Emiten	Total Assets (Rp)
1	Infrastructure, Utilities and Transportation	5	212.053.640.000.000
2	Finance	13	1.480.140.211.000.000
3	Goods Industry	4	75.875.827.000.000
4	Agriculture	3	21.467.029.000.000
5	Mining	8	213.978.634.040.000
6	Basic Industry and Chemicals	5	50.527.213.000.000
7	Trade, Service and Investment	3	52.336.122.000.000
8	Property, Real Estate and Building Construction	3	18.355.059.000.000
9	Miscellaneous Industry	1	80.740.000.000.000
	<b>Total</b>	<b>45</b>	<b>2.205.473.735.040.000</b>

**Sumber : Laporan Tahunan Emiten yang Tergolong 45 Biggest Market Capitalization di Bursa Efek Indonesia 2008**

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

**“Hubungan Ukuran Perusahaan dan Porsi Kepemilikan Saham Publik dengan Tingkat Pengungkapan Laporan Tahunan Perusahaan”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan ukuran perusahaan dengan tingkat pengungkapan laporan tahunan.
2. Bagaimana hubungan porsi kepemilikan saham publik dengan tingkat pengungkapan laporan tahunan.
3. Bagaimana hubungan ukuran perusahaan dan porsi kepemilikan saham publik secara simultan dengan tingkat pengungkapan laporan tahunan

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Gagasan penelitian ini didorong oleh keingintahuan secara lebih mendalam mengenai hubungan ukuran perusahaan, porsi kepemilikan saham publik dengan tingkat pengungkapan. Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hubungan ukuran perusahaan dengan tingkat pengungkapan laporan tahunan.
2. Untuk mengetahui hubungan porsi kepemilikan saham publik dengan tingkat pengungkapan laporan tahunan.
3. Untuk mengetahui hubungan ukuran perusahaan dan porsi kepemilikan saham publik secara simultan dengan tingkat pengungkapan laporan tahunan

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan maksud dan tujuan penelitian diatas, penulis berharap bahwa hasil penelitian ini akan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis dapat digunakan sebagai bahan kajian dan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh ukuran perusahaan dan porsi kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan laporan tahunan.
2. Secara praktis dapat digunakan diantaranya bagi:
  - a. BAPEPAM dan Bursa Efek Indonesia untuk mengembangkan, mengubah dan menjelaskan peraturan yang berlaku dalam rangka menciptakan pasar modal yang efisien.
  - b. Emiten dapat memberikan pengetahuan mengenai *minimum disclosure* agar informasi yang disajikan dapat bermanfaat untuk analisis dan pengambilan keputusan investasi.